

ISBN: 978-602-1004-33-3

FISIP  
32  
TANGEN

Anak,  
Perempuan dan  
Perubahan Sosial

Prosiding

Seminar Nasional dan Call Paper  
Dies Natalis FISIP UNSOED ke 32  
21 November 2016



Penerbit

Universitas Jenderal Soedirman

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>Makalah</b>	
<b><i>Kajian Sosial</i></b>	
Rekayasa Sosial Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pelestarian Fungsi <i>Mangrove</i> Upaya Mewujudkan Desa Inovasi Nelayan Kampung Laut (Edy Suyanto, Sotyania Wardhiana, FX Wardiyono dan Hendri Restuadhi) .....	1
Relasi Anak Perempuan Dan Ibu Sebagai Buruh Migran Perempuan Indonesia: <i>Long Distance Mothering Dan Shared Mothering</i> (Elisabeth Dewi dan Pingkan Audrie) .....	15
Studi Partisipasi Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Pedesaan (Endang Dwi Sulistyoningih) .....	29
Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan di Perkotaan: Antara Keluarga dan Kebebasan (Nyayu Fatimah) .....	47
Profil Penduduk Lanjut Usia Perempuan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Upaya untuk Perlindungan dan Pemberdayaan (Soetji Lestari) .....	59
Resistensi, Tidak Peduli, Empati: Respons Masyarakat Dalam Proses Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum (Tri Wuryaningih) .....	72
Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pondok Pesantren Modern Sumatera Barat (Wahyu Pramono dan Indraddin) .....	84
<b><i>Kebijakan Publik dan Hukum</i></b>	
Implementasi Bina Damai Di Sekolah Berbasis Peace Education (Elpeni Fitrah) .....	96
Kebijakan Pengupahan Buruh/Perempuan Sektor Industri Dalam Penerapan <i>Putting Out System</i> Di Kabupaten Sidoarjo (Luluk Fauziah dan Mashudi) .....	106
Kebijakan Desa Siaga: Upaya Perlindungan Perempuan Berbasis Masyarakat Terhadap Kejadian Kematian Ibu: Studi Kasus Desa Siaga Karang Bajo, Lombok Utara (Novianti Sihombing) .....	121

Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Human <i>Trafficking / Forced Labour</i> (R.Eriska Ginalita Dwi Putri) .....	135
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Banyumas (Riris Ardhanariswari) .....	148
Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Berperspektif Gender Pada Sekolah Vokasi: Studi Kasus Di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (Tri Kuat) .....	159
Perlindungan Perempuan Korban Perdagangan Orang: Studi Sosio Legal Kasus Perdagangan Orang Di Kabupaten Malang (Wahyu Krisnanto) .....	172
<b><i>Telaah Politik, Komunikasi dan Internasional</i></b>	
Pemaknaan Ponsel Pintar Pada Generasi X, Y, Z: Dilema Dan Tantangannya (Ana Widarsih) .....	186
Melindungi Apa Dan Siapa? Dekonstruksi Paradoks Nilai Universal Perlindungan Korban Perdagangan Manusia pada Protokol Palermo (Benni Yusriza) .....	200
Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Telaah Diskursus Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di DKI Jakarta (Dodi Faedluloh) .....	216
Gerakan Perempuan Di Kota Tasikmalaya (Fitriani Yuliatwati dan Noneng Masitoh).....	230
Peningkatan Peran Publik Perempuan: Studi Kasus Pada Buruh Industri Perempuan di Kabupaten Purbalingga (Tobirin) .....	247
Globalisasi Dan Perdagangan Manusia Di Kawasan Singapura Johor Riau: Studi Kasus Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Serta Komitmen Penanggulangannya (Yusnarida Eka Nizmi dan Elnovani Lusiana) .....	261

## **Peningkatan Peran Publik Perempuan (Studi Kasus Pada Buruh Industri Perempuan di Kabupaten Purbalingga)**

Oleh:  
Tobirin

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsoed Purwokerto  
Tobi.rifan@gmail.com

### **Abstrak**

Makalah ini mendiskusikan peningkatan peran publik perempuan yang berimplikasi terhadap perubahan relasi dan cara pandang terhadap perempuan. Perempuan tidak sekedar berperan di ranah domestik tetapi mampu berperan di ranah publik dan menguasai posisi strategis yang dikuasai laki-laki. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi dari tingkat pendidikan perempuan yang semakin tinggi tetapi karakter perempuan yang semakin mandiri memiliki kecerdasan sosial dan tidak tergantung pada kondisi sosial ekonomi. Perspektif berbeda ini terjadi pada masyarakat industri maju dan kelas menengah sementara hal yang berbeda masih dialami oleh perempuan lain dengan semakin termarginalkan, mengalami tindak kekerasan, stereotipe dan subordinasi. Ketimpangan dan ketidakadilan gender terus terjadi dan cenderung meningkat. Posisi perempuan yang demikian menarik untuk dikaji terutama pada buruh perempuan di Kabupaten Purbalingga yang mengalami proses perubahan sosial yang signifikan akibat industrialisasi. Metode penulisan makalah ini adalah kualitatif, pendekatan analisis melalui analisis data sekunder diperoleh hasil, terjadi pergeseran peran domestik perempuan ke publik pada buruh perempuan dengan tidak diikuti kesadaran gender. Buruh perempuan menguasai aset ekonomi, berperan dalam pengambilan keputusan, sedangkan laki-laki mengalami inferior maskulin dengan tidak ada kesempatan dalam pekerjaan. Buruh perempuan mengalami eksploitasi baru dengan upah yang rendah dan pemanfaatan buruh dengan pendidikan rendah. Perempuan dianggap mendominasi di ranah domestik karena keunggulan aksesibilitas dan kesempatan pada dunia industri.

**Kata kunci:** , *dominasi, eksploitasi, peran publik perempuan*

### **Abstract**

This paper discusses the improvement of the public role of women with implications for the relationship changes and the perspective of women. Women not only play a role in the domestic realm but could play a role in the public sphere and master the strategic position held by men. This condition is not only influenced by the level of education of women is higher but increasingly independent female characters have social intelligence and is not dependent on socio-economic conditions. These different perspectives occur in advanced industrial societies and middle class, while a different matter is still being experienced by other women with increasingly marginalized, abused, stereotyped and subordinate. Inequality and gender inequalities persist and are likely to increase. The position of women is thus interesting to study, especially on women workers in Purbalingga experiencing significant social change processes as a result of industrialization. Methods of this paper is the qualitative method, in accordance interviews and secondary data analysis result has been to shift the domestic role of women to the public on women workers with no gender awareness followed. Labour women rule over economic assets, plays a role in decision-making, while men experienced inferior masculine with no chance in the job. Labour exploitation of women experienced a new low wages and labor utilization with low education. Women are considered to dominate in the domestic sphere because of the advantages of accessibility and opportunity in the industrial world.

**Keywords:** *domination, the exploitation, the public role of women*

### **Pendahuluan**

Diskursus gender dalam pembangunan menjadi isu yang setiap saat menarik untuk diperdebatkan dalam masa transisi dan perkembangan otonomi daerah yang semakin melembaga. Prioritas pengambilan kebijakan yang berperspektif gender menjadi tuntutan. Namun seringkali masalah politik dan kekuasaan menimbulkan kebijakan yang justru

melahirkan berbagai permasalahan baru yang lebih diskriminatif. Kebijakan dalam pembangunan seringkali populis tetapi tidak menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebijakan pembangunan tidak mengedepankan *evidence based* tetapi mengutamakan emosionalitas massa pendukung kekuasaan.

Pada perkembangannya pemilihan kebijakan pembangunan saat ini lebih pada pertimbangan rasionalitas kekuasaan daripada kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, seperti kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, rendahnya pendidikan, minimnya kualitas SDM, infrastruktur dan kesetaraan gender. Kebijakan pembangunan tidak harus populis tetapi sejauh mana kebijakan pembangunan mampu memberikan solusi alternatif pemecahan masalah.

Kebijakan pembangunan yang Berperspektif gender masih menjadi impian bersama karena kondisi kaum perempuan masih dihadapkan pada persoalan posisi perempuan yang relatif tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Fatimaningsing (2008) Permasalahan Perempuan dalam kehidupannya masih di hadapkan pada hal berikut:

- a. *Di bidang pendidikan*, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang peserta didik perempuan; tingginya angka putus sekolah dan buta huruf anak perempuan; serta masih banyaknya materi bahan ajar yang bias gender dan diskriminatif.
- b. *Di bidang kesehatan*, permasalahan yang sering muncul adalah berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya status gizi ibu hamil dan menyusui; rendahnya kontrol perempuan dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; serta rendahnya partisipasi dan tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan keluarga dan dalam ber-KB.
- c. *Di bidang ekonomi*, permasalahan dilihat dari terbatasnya akses perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk akses untuk mendapat modal, pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar yang dapat mendorong kemandirian dalam berwirausaha.
- d. *Di bidang politik atau kekuasaan pengambilan keputusan*, dapat dicermati pada rendahnya persentase perempuan yang menjadi wakil rakyat (anggota DPR dan DPRD), sebagai hakim, sebagai PNS, sebagai pejabat Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, sebagai camat, dan sebagai pejabat struktural dan fungsional. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pengambilan keputusan.
- e. *Di bidang hukum*, masih terdapat undang-undang dan peraturan yang bias gender, sehingga perempuan belum memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya secara penuh. Permasalahan lain yang tak kalah serius adalah kekerasan dan perdagangan manusia serta perlindungan anak.

Permasalahan tersebut, secara umum dapat dikatakan pembangunan gender di Indonesia masih dihadapkan pada a) pendidikan, sesuai data susenas tahun 2012, presentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar persentasenya dibandingkan penduduk laki-laki. Proposisinya laki-laki yang memiliki ijazah 10,13 persen lebih besar dibandingkan proposi perempuan 9,45 persen. b) Kesempatan kerja dan berusaha, tingkat rasio partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan dari tahun 2008-2012

perempuan yang bekerja sebesar 47,91 persen sedangkan proporsi laki-laki yang bekerja 79,57 persen. Laki-laki yang mengurus rumah tangga 1,63 persen dan perempuan 36,97 persen, pekerja perempuan yang tidak dibayar 31,28 persen. Sedangkan laki-laki yang bekerja tidak dibayar 7,01 persen. c) kesempatan dalam pemerintahan prosentase PNS perempuan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki (Anonim, Buku Pembangunan Gender di Indonesia 2013)

Gambaran pembangunan gender di Indonesia menjadi gambaran pembangunan gender di daerah. Apalagi di era otonomi daerah yang mengedepankan semangat desentralisasi dan pemerintahan yang demokratis menjadi problematik antara persoalan pembangunan berbasis gender atau kebijakan pragmatis yang menguntungkan kekuasaan. Disinilah peran daerah untuk berkreasi melaksanakan berbagai program pembangunan berspektif gender.

Menyadari dan memahami permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan gender, berbagai daerah merubah paradigma pembangunannya dengan berorientasi pada pembangunan berperspektif gender. Upaya ini tidak lepas dari prioritas pembangunan yang disepakati bersama dalam tujuan pembangunan milenium (MDGs). Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan salah satu dari delapan yang disepakati secara internasional tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang dirancang untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Selain memperhatikan masalah tersebut suatu daerah tidak lepas dari Ekonomi baru ditandai dengan globalisasi dan meningkatnya penggunaan komputer dan informasi teknologi, tetapi juga oleh deregulasi, polarisasi pendapatan dan feminisasi kerja, dengan pola dan jam kerja yang baru dan lebih fleksibel. Namun hal ini tidaklah mudah untuk diselesaikan seperti halnya pandangan dari kaum feminis Melalui MDGs sebenarnya agenda kesetaraan gender dapat diseleraskan melalui kebijakan pembangunan dengan integrasi program pembangunan berbasis gender. Program yang mengakui partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan (Momsen, 2010 & Sen, 2013).

Perubahan global, deregulasi kebijakan dan strategi perjuangan gerakan perempuan semakin menyadarkan bahwa pembangunan berperspektif gender dengan mengedepankan perempuan sebagai entitas yang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan akan terus menjadi pemikiran bersama. Kondisi ini menuntut perempuan menjadi bagian yang memiliki posisi strategis dalam ekonomi baru. Salah satu perkembangan yang meyakinkan adalah perempuan yang mampu menguasai ekonomi pada saat krisis pada masyarakat Amerika di tahun 2009 dan peningkatan peran perempuan di segala bidang yang semakin tajam di Inggris diikuti di India, Korea Selatan dan Cina menunjukkan bahwa perempuan telah berubah. Peningkatan peran publik perempuan yang menguasai aset

ekonomi dengan menduduki tempat strategis dalam ekonomi baru melahirkan perempuan yang mandiri, cerdas dan meyakinkan (Rosin, 2012).

Perekembangan dan peningkatan peran publik perempuan menjadi dasar perubahan dasar terhadap cara pandang perempuan tidak lagi sebagai *second class* di tengah budaya patriarki yang mengakar. Perempuan mampu tampil dan memimpin dunia menggantikan peran laki-laki yang semakin termarginalkan karena kebiasaan laki-laki yang kurang beradaptasi terhadap perubahan global.

Persoalan inilah yang menjadi awal dalam kajian dalam makalah ini, peningkatan peran publik perempuan di relevansikan dengan semakin pentingnya perempuan dalam sistem ekonomi Kabupaten Purbalingga. Daerah ini telah berubah daerahnya dengan industrialisasi yang semakin berkembang. Industri bulu mata dan rambut palsu dari Korea Selatan telah merubah tatanan ekonomi menjadi ekonomi daerah yang berbasis pada industri.

Industri bulu mata dan rambut palsu menuntut perempuan sebagai pekerja yang dibutuhkan dibandingkan laki-laki. Akibatnya laki-laki tidak mendapat perhatian dan tidak terserap dalam industri masal tersebut. Peran laki-laki dalam budaya patriarki sebagai pencari nafkah tergantikan oleh perempuan. Penguasaan aset ekonomi perempuan pekerja buruh pabrik Kabupaten Purbalingga telah merubah struktur sosial di daerah tersebut. Berdasarkan pengamatan dan observasi awal perubahan ini dianggap sebagai bentuk dominasi baru terhadap perempuan.

Fenomena tersebut menjadi titik awal dari masalah penelitian apakah peningkatan peran publik perempuan sebagai bentuk dominasi baru terhadap suami buruh industri di Kabupaten Purbalingga ataukah sebaliknya sebagai bentuk eksploitasi kaum perempuan buruh industri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peningkatan peran publik perempuan sebagai buruh industri apakah bentuk dominasi atau eksploitasi baru.

## **Kajian Pustaka**

### **Gender dan Isu Pembangunan**

Pemikiran Harcourt (2009) dalam buku tentang gender and development adalah buku yang berjudul *Body Politics in Development: Critical Debates in Gender and Development*. Buku ini direview oleh Bergeron (2010), dalam buku ini menjelaskan tentang kontestasi gender dalam pembangunan, Keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak reproduksi dan seksual, memprotes kekerasan berbasis gender, dan memobilisasi untuk menuntut dukungan dalam pekerjaan perempuan. Kritik terhadap kebijakan pembangunan sejak 1980-an Harcourt mengintegrasikan teori, kelembagaan dan aktivis tantangan batas-batas antara mereka untuk memberikan analisis yang kaya tentang bagaimana dijelaskan dalam teori dan praktek pembangunan.

Secara jefas buku mendiskusikan sejarah konseptual politik tubuh dalam gender dan pembangunan, bagaimana menghubungkan isu yang diangkat oleh ahli teori feminis dengan berkembang strategi politik feminis yang terjadi dalam lembaga-lembaga global, organisasi non-pemerintah, gerakan hak-hak perempuan. Bagaimana isu-isu perkosaan, hak-hak seksual dan reproduksi telah menjadi dasar penting untuk perjuangan feminis di panggung global. Bagaimana memikirkan strategi untuk menempatkan perwujudan perempuan di pusat pembangunan tanpa essensi melibatkan tubuh perempuan dalam proses. Meneliti praktek keluarga berencana, populasi dan kebijakan hak-hak reproduksi di mengembangkan, dan menunjukkan masalah kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam Gender dan Pembangunan meninjau bahasa dan praktik kebijakan kependudukan yang ada

Berangkat dari studi tersebut sebenarnya gender sebagai isu pembangunan dapat ditelusuri secara historis, gender menjadi isu yang pada awalnya kirtik pada teori pembangunan ortodok yang menghasilkan kemikiskinan, diskriminasi, ketidakberdayaan pada kaum perempuan. Oleh karena muncul gerakan femanisme pada tahaun 1970an yang memperjuangkan konsep *women in development* (WID), berganti menjadi menjadi konsep *women and development* (WAD) sebagai pengaruh dari gerakan femanisme neo marxisme yang tetap gagal dalam memberdayakan kaum perempuan miskin, kehadiran konsep gender and development (GAD) sebagai tawaran dan alternatif pendekatan dalam pembebasan kaum perempuan dari penindasan dan ketidakadilan gender (Mosse, 1993).

Isu perempuan dan pembangunan berangkat dari kerangka teori yang terus berkembang, dari teori modernitas menghasilkan konsep WID, dependesi menghasilkan konsep WAD dan feminis sosialis melahirkan strategi GAD sebagai pendekatan yang mengedepankan *equity* dan *equality* terhadap gender (Sulstiyani, 2006). Strategi ini dianggap sebagai pendekatan alternatif dalam memberikan cara pandang terhadap ekloitasi perempuan yang semakin masif.

Menurut Longchar (2013) proses perubahan pembangunan yang berdampak pada laki-laki dan perempuan disebabkan oleh adanya perubahan iklim, terorisme, naiknya harga pangan dan minyak dunia. Maka diperlukan reorientasi berbeda dalam pembangunan berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Perhatian terhadap perempuan terutama pada kesehatan produksi, gender dan pendidikan, kekerasan, ekofenisme, kesempatan kerja bagi perempuan di pedesaan, marginalisasi perempuan dalam pekerjaan menjadi agenda yang serius.

Menurut Windiani (2011) salah satu pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dapat dikaji dari hal berikut:

"Gender dan Pembangunan (Gender and Develepmen-GAD) merupakan pendekatan yang mempertanyakan teori-teori yang lazim diterima tentang apa yang dibawa oleh pembangunan yang baik, yang menegaskan bahwa ada nilai yang lebih dalam pembangunan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memahami tujuan



pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan menransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka”

Pendekatan ini tidak lepas dari peran perempuan yang masih terpinggirkan dan memiliki posisi yang lemah dalam pembangunan. Hal ini ditegaskan dalam Penelitian dari (Pujiati, 2012), hasil studi menunjukkan peran wanita dalam pembangunan masih rendah, dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan peran wanita di sektor publik. Hasil uji Kausalitas Granger menunjukkan terdapat hubungan searah antara peran wanita dalam pembangunan dan fundamental ekonomi, bukan hubungan yang timbal balik. Hal ini berarti peran wanita dalam pembangunan yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah meningkat

Persepsi masyarakat terhadap perempuan masih sama, walaupun berbagai peran keberhasilan dalam pembangunan menunjukkan peningkatannya. Menurut Puspitawati, (2010) perempuan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai aktor yang berperan sebagai figur ekspresif, yaitu berfungsi sebagai pemelihara dan pendidik keluarga, sedangkan laki-laki dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur instrumental, yaitu berfungsi sebagai pencari nafkah keluarga. Jenis kelamin, contoh perempuan, mempunyai perspektif gender yang lebih baik dibandingkan dengan, contoh laki-laki, yaitu persepsi terhadap peran gender dalam pekerjaan domestik dan dalam pekerjaan publik dan sosial. Contoh perempuan lebih fleksibel dalam melaksanakan peran gender di sektor domestik maupun publik, dan cenderung mempunyai persepsi peran gender yang dapat diubah atau ditukarkan.

#### **b. Pemberdayaan Perempuan dan Kritik Maskulinitas**

Pada saat ini pendekatan pembangunan masih bersifat ekonomis dan *charity*, terutama kaum perempuan sebagai subyek dan obyek pembangunan sering kali terabaikan oleh program-program yang memiliki sensitivitas gender. Program pemberdayaan seperti PNPB perkotaan atau pedesaan, SPP, Bantuan Kompensasi BBM, seringkali bersifat sementara tidak menyelesaikan persoalan. Masyarakat terutama perempuan semakin termarginalkan oleh program yang tidak menyentuh pada kebutuhan kaum perempuan. (Windiani, 2011).

Menurut (Pujiati, 2012) Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia, dan ditujukan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, masih rendah, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi dan eksploitasi.

Kondisi ini sudah berlangsung lama, terutama di negara selatan, kondisi ini memunculkan pentingnya isu gender dan pembangunan, gerakan yang diawali oleh kaum feminisme pada tahun 1970an berupaya mengintegrasikan dan meningkatkan peran kaum perempuan dalam pembangunan melalui konsep *women in development*, konsep WID dianggap gagal dan berganti menjadi *Women and Development* sebagai kritik dan gerakan kaum feminisme neo marxis, karena konsep ini tidak mengakomodir kaum miskin, konsep ini pun dianggap gagal dan muncul konsep yang saat ini dikenal dengan *gender and development (GAD)*, menawarkan konsep pembangunan dari perspektif kekerasan dan ketidakadilan gender. Ketimpangan dan kesenjangan relasi dan interaksi antara laki-laki dan perempuan dapat diamati melalui sistem sosiokultural, pengakuan hak-hak perempuan, rendahnya sumberdaya manusia perempuan, dan sistem yang kurang demokratis. Alternatif strategi yang ditawarkan untuk mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan melalui reformasi institusi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan demokratisasi (Mosse, 1993 & Sulistiyani, 2006).

Demikian halnya dengan pencapaian pembangunan gender menurut (Agustini dkk, 2013: 30) mengatakan bahwa;

“melalui kesetaraan dan keadilan gender ditandai tidak adanya diskriminasi antar perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumberdaya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya

Berbagai pendekatan dan analisis gender dan pembangunan masih menempatkan bahwa perempuan adalah tertindas, tersubordinat dari budaya patriarki, diskriminasi, ketidakterwakilan dalam parlemen, kaum perempuan miskin dan termarginal. Pendekatan gender dan pembangunan menganggap laki-laki adalah instrumen sebagai analisis tidak menganggap sebagai subyek yang berperan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, disebut juga dengan penelitian interpretif dengan logika induktif yang sangat percaya bahwa terdapat perspektif yang akan diungkapkan dalam satu fenomena sosial dan menekankan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi, adanya kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa suatu proses ilmiah yang terlegitimasi (Lodico, Spaulding dan Voegtelle, 2006). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang mengalami perubahan dan transformasi sosial yang sangat cepat akibat industrialisasi. Perubahan sosial ini terjadi pada cara pandang masyarakat terhadap perempuan buruh industri yang mengalami perubahan peran dari domestik ke publik.

Berbagai persoalan muncul akibat perubahan peran ini, oleh karena pengamatan dan observasi dilakukan pada kelompok sasaran pengambil kebijakan, anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Ketua Satpol PP, Masyarakat, NGO, dan Buruh perempuan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2016 dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis data melalui analisis data sekunder berupa dokumen RPJMD, pembangunan gender Kabupaten Purbalingga, media massa, Perda tentang gender dan anak, serta dokumen lain yang mendukung analisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **a. Industri dan Peningkatan Peran Publik Perempuan di Kabupaten Purbalingga**

Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang mengalami transisi cukup cepat. Sebelum tahun 2000 Kabupaten Purbalingga terkenal sebagai daerah miskin di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Seiring dengan berbagai perubahan kebijakan pembangunan, salah satunya adalah deregulasi kebijakan perijinan investasi yang pro terhadap berbagai investasi yang lebih spesifik adalah investasi asing dari Korea Selatan telah membawa perubahan yang cukup besar dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga. Tumbuhnya industri bulu mata dan rambut palsu serta industri lain telah merubah kehidupan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Perubahan yang dirasakan adalah bergesernya kehidupan masyarakat dari daerah agraris ke daerah yang menggantungkan pada kehidupan industri. Sesuai catatan BPS tahun 2010 dari 18 Kecamatan yang tidak ada industrinya hanya 3 Kecamatan yaitu Kertanegara, Rembang, dan Karangreja. Industri Kabupaten Purbalingga menyerap tenaga kerja 32.844 tenaga kerja dan terus berkembang mencapai 52 lebih. Tercatat, dari 415 perusahaan, terdapat 32,99 buruh wanita. Adapun buruh laki-laki tak sampai setengahnya, hanya 15,25 ribu orang. (Satelit Post, 22/4/2016)

Implikasi perubahan besar itu telah membawa dampak kemajuan ataupun ironi pembangunan. Dampak dari ironi pembangunan di Kabupaten Purbalingga adalah meningkatnya berbagai persoalan penyakit sosial. Permasalahan sosial dari peningkatan pengemis dan gelandangan, PSK jalanan di sekitar pasar hewan Kabupaten Purbalingga, kenalan remaja, hamil diluar nikah yang terus meningkat, dan angka gugat cerai yang terus bertambah.

Perubahan sosial yang dirasakan lain adalah peran perempuan yang mengalami perubahan peningkatan peran publik menjadi pekerja industri. Perempuan yang diposisikan memiliki peran domestik dalam pandangan budaya patriarki mengalami perubahan peran dalam peran publiknya dan menghasilkan atau bersifat produktif. Perempuan terserap dalam industri bulu mata dan rambut palsu sedangkan laki-laki banyak menganggurnya karena

tidak digunakan oleh industri. Sesuai hasil wawancara yang pada anggota DPRD dan Sekwan DPRD Purbalingga menyatakan hal sebagai berikut'

"Industri telah merubah tatanan masyarakat Kabupaten Purbalingga dimana posisi kaum laki-laki tidak banyak diuntungkan dibandingkan kaum perempuan. Kaum perempuan terserap dalam industri dan memiliki posisi yang berubah dengan menguasai aset ekonomi dalam keluarga. Keberadaan perempuan yang demikian menggantikan kebiasaan dimana laki-laki adalah pencari nafkah. Perempuan yang bekerja di industri mengalami posisi dominan di tingkat domestik.

Pendapat senada disampaikan oleh salah seorang pemerhati sosial di Kabupaten Purbalingga yang menyatakan tidak adanya kesempatan laki-laki yang bekerja di industri menimbulkan permasalahan sosial dan perubahan relasi gender yang signifikan. Terjadinya peralihan atau pergeseran peran publik, perempuan bekerja sebagai buruh pabrik dan laki-laki berperan pada ranah domestik. Isitilah yang populer adalah "Pamong Praja".

Perubahan peran publik perempuan telah merubah kesadaran bersama masyarakat bahwa perempuan dapat berperan lebih dalam masyarakat. Namun kondisi ini menimbulkan inferioritas budaya patriarki yang selama ini digambarkan bahwa laki-laki adalah dominan, sebagai pencari nafkah, pemimpin dalam keluarga dan laki-laki haruslah diutamakan. Menurut Tripathy (2011) budaya patriarki merupakan ideologi yang tertanam secara universal dalam suatu tempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kaum feminis menganggap budaya patriarki dilihat sebagai masalah biologis dan selalu patriarki yang menempatkan laki-laki selalu superior dan dominan terhadap perempuan. Sistem budaya patriarki menyebabkan persoalan yang dihadapi perempuan secara structural, yang menunjukkan hubungan laki-laki dan perempuan tidak setara. Adanya kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan semakin lemahnya peran negara melindungi warganya akibat tekanan globalisasi.

#### **b. Dominasi atukah Eksploitasi Buruh Perempuan**

Perubahan peran gender akibat pertumbuhan industri telah menimbulkan berbagai persoalan, permasalahan yang menonjol adalah penyakit sosial yang terus meningkat. Selain meningkatnya penyakit sosial, salah satu masalah yang mendapatkan perhatian adalah masalah gugat cerai atau perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan yang mencapai 300 %. Permasalahan gugat cerai mewarnai kehidupan rumah tangga masyarakat Purbalingga, dan dianggap sebagai bagian permasalahan industrialisasi. Akar permasalahan ini perlu dikaji mendalam, dan merupakan gejala sosial yang hampir terjadi di seluruh Indonesia, berbagai alasan menyebutkan tentang alasan semakin tingginya gugat cerai, sebagian besar masyarakat beralasan munculnya gugat cerai karena masalah ekonomi dan perubahan peran publik perempuan yang meningkat. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, menurut beberapa studi yang menyebutkan tentang semakin tingginya status

ekonomi perempuan bukan menjadi satu alasan tentang terjadinya peningkatan gugat cerai melainkan masalah ketimpangan dan ketidakadilan gender (Sofiani, 2014)

Sisi lain kehidupan buruh perempuan rentan eksploitasi dan diskriminasi, hal ini sesuai sifat diskriminasi dari kapitalisme global yang menghendaki tenaga kerja murah. Tenaga kerja perempuan juga kurang mendapat perhatian dari aspek kesejahteraan terutama, cuti ibu hamil, keselamatan kerja, dan timbulnya gejala "lesbian" dalam lingkungan kerja. Hal ini perlu diperhatikan kecenderungan kapitalisme global yang ditandai dengan ekonomi baru yang ditandai dengan globalisasi dan meningkatnya penggunaan komputer dan informasi teknologi, tetapi juga oleh deregulasi, polarisasi pendapatan dan feminisasi kerja, dengan pola dan jam kerja yang baru dan lebih fleksibel (Monsen, 2010)

Permasalahan perlu dikaji dalam sudut pandang kesetaraan dan keadilan gender. Permasalahan pertama yang berhubungan dengan dominasi perempuan terhadap laki-laki di ranah domestik. Hal ini merupakan dinamika perubahan relasi gender yang perlu dipahami dan dicermati. Sesuai pandangan masyarakat dan data sekunder berhubungan penyerapan tenaga kerja perempuan, telah terjadi perubahan peran gender akibat kebutuhan industri yang tidak memungkinkan pekerja laki-laki tetapi lebih mengakomodir pekerja perempuan. Akibatnya pengangguran laki-laki semakin bertambah. Kehadiran industri massal tersebut mengurangi pengangguran sekitar 3 persen pada tahun 2010 dan di tahun 2011 mengalami kenaikan kembali 4,5 persen dan terus meningkat di tahun 2015 ketimpangan jumlah permintaan tenaga perempuan (Satelit Pos, 24/4/2016)

Ketidaktersediaan pekerjaan pada laki-laki menimbulkan peralihan peran gender yang dianggap menimbulkan ketimpangan gender. Dominasi perempuan terhadap laki-laki dalam aksesibilitas terhadap pekerjaan, menyebabkan implikasi dalam relasi gender di tingkat domestik. Perempuan yang selama ini patuh dan hormat pada laki-laki sebagai suaminya harus berubah peran dengan perempuan beralih menjadi sumber penghasilan dan menguasai aset ekonomi, sedangkan laki-laki menganggur. Perubahan ini menimbulkan persepsi dan anggapan bahwa perempuan telah mendominasi karena perempuan lebih otonom, menguasai aset ekonomi, pengambilan keputusan keluarga yang tidak tergantung pada suami.

Terjadinya perubahan relasi gender secara vertikal pada perempuan diikuti dalam kehidupan keluarga, pola asuh anak yang berubah, pengambilan keputusan dalam program KB tidak dilakukan secara bersama tetapi didominasi oleh perempuan demikian pula tingkat perceraian yang semakin meningkat adalah atas permintaan kaum perempuan. Kondisi dominannya perempuan dalam hal ini diperburuk dengan stereotipe gender yang merugikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, penyangga ekonomi dalam budaya patriarki dan agama yang kuat menyebabkan laki-laki semakin inferior.

Peran perempuan dalam domain publik menjadi proses yang panjang dalam proses perlawanan terhadap simbolisasi dominasi laki-laki. Penelusuran historis menjadikan laki-laki yang mendominasi dalam domain publik dan berkembang menjadi hegemonik. Proses hegemoni mengacu pada budaya ideal bentuk karakter maskulin yang dimunculkan secara dominan dalam bentuk maskulinitas. Maskulinitas berasal dari hubungan kekuasaan dan dapat dicirikan baik sebagai hegemonik atau subaltern dalam hubungannya dengan satu sama lain. Maskulinitas berada dalam proses konstan menjadi dibangun dalam situasi sosial tertentu, mereproduksi atau mengubah struktur sosial (Alcadipani & Maria Jose Tonelli, 2014).

Perubahan relasi gender di tingkat domestik menimbulkan persepsi tentang dominannya perempuan dan inferiornya laki-laki. Budaya patriarki semakin menjustifikasi bahwa laki-laki telah kehilangan otoritasnya sebagai pihak yang diuntungkan dan dominan. Pandangan patriarki yang menganggap laki-laki adalah pemilik kekuasaan dan otoritas keluarga akan memudar seiring dengan peran perempuan yang menggantikan peran laki-laki dalam mencari nafkah.

Fenomena yang berbeda dengan industrialisasi di Kabupaten Purbalingga apabila dicermati tentang nasib perempuan dalam peran publiknya. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan UMK perempuan dan implikasi kebijakan terhadap buruh perempuan. Buruh perempuan menjadi korban, perempuan dirugikan dengan eksploitasi dalam pekerjaan. Industri di lingkungan Kabupaten Purbalingga termasuk dalam tenaga kerja murah dari tahun ketahun tidak ada kenaikan signifikan. Demikian halnya dalam kesejahteraan pekerja, jenjang karier, cuti hamil, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja belum mendapatkan perhatian optimal. Bentuk lain dari eksploitasi pekerja adalah jam kerja yang selalu bersama menimbulkan hubungan terlarang yaitu "lesbian" tumbuh subur walaupun hal ini sulit untuk dibuktikan (Slamet, 2013)

Penelitian lain yaitu (Khotimah, 2009 & Handayani 2013) bahwa diskriminasi dalam pekerjaan selalu muncul karena subordinasi terhadap perempuan, pendidikan yang rendah, marginalisasi kaum perempuan. Dalam hubungan kerja perempuan hanya sebagai barter dan warga kelas tiga dalam pekerja yaitu kelas atas, menengah dan kelas bawah atau pekerja buruh.

Kondisi ini tidak dicermati oleh pihak pengambil kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten cenderung menyadari dengan pengangguran laki-laki. Sehingga kebijakannya lebih kepada *affirmatif action* untuk jaminan sosial pada pengangguran laki-laki melalui program padat karya dan pelatihan tenaga kerja. Sisi kebijakan lain tidak disentuh terutama pada pengaturan jaminan kesejahteraan pekerja, perlindungan pekerja, kehidupan keluarga dan pertumbuhan anak-anak di Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan kajian gender dan diversitas global yang menganggap terjadi perubahan cara hidup, kondisi ini berimplikasi pada keuntungan dan kerugian kesejahteraan kaum perempuan. Diskursus menyangkut aspek perubahan global dalam era keterbukaan arus investasi modal asing dalam bidang industri yang berpengaruh terhadap liberalisasi perdagangan. Kondisi ini mengakibatkan kaum perempuan dianggap sebagai barter keuntungan antara majikan dan kaum perempuan sebagai aset industri yang menguntungkan. (Abudullah, 2003, Handayani & Sri Wahyuni, 2013).

Permasalahan ini perlu diurai dalam sudut pandang yang konferehensif, sebagian masyarakat sesuai dengan hasil wawancara yang mendalam bahwa perubahan peran gender berimplikasi pada bentuk dominasi gender dengan berbagai alasan. Sisi lain ketika buruh perempuan berperan dalam ranah publik masih rentan dalam diskriminasi dan eksploitasi. Memungkin terjadinya beban ganda yang dialami oleh buruh perempuan. Dalam pandangan peneliti adanya proses dominasi dalam pandangan (Burdeau, 2010) bahwa dominasi terjadi seringkali tidak disadari karena dominasi muncul dari symbol dan kesadaran dalam alam pikiran yang tidak disadari. Perubahan peran gender yang menimbulkan konflik kepentingan dari relasi gender yang tidak seimbang, perlu diantisipasi dengan kesadaran pentingnya peran gender yang terbuka dan memperhatikan keterlibatan kaum laki-laki. Munculnya konsep laki-laki baru yang menghendaki pentingnya kesadaran gender perlu dibangun secara bersama dengan melibatkan keduabelah pihak. Artinya laki-laki perlu diberdayakan dengan sensitive gender.

### **Kesimpulan**

Industri bulu mata dan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga telah merubah tatanan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan yang signifikan adalah terjadinya perubahan peran publik perempuan yang semakin meningkat. Perempuan menjadi penopang tenaga kerja sebagai buruh di industri tersebut. Akibat dari penyerapan tenaga kerja yang lebih dibutuhkan perempuan daripada laki-laki menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam memandang perempuan di tingkat domestik dan peran publiknya. Perempuan dianggap telah mengalami perubahan peran dari domestik ke publik, sementara laki-lakinya berperan dalam bidang domestik karena tidak terserap menjadi tenaga kerja buruh industri. Perubahan ini dianggap bentuk dominasi perempuan di tingkat domestik dengan semakin tingginya penguasaan aset ekonomi, pengambilan keputusan dalam keluarga lebih berperan, aksesibilitas dalam bidang ekonomi yang semakin tinggi.

Sementara pada saat perempuan bekerja sebagai buruh industri, dihadapkan pada permasalahan tidak adanya perlindungan buruh dalam kesejahteraanya, jaminan cuti melahirkan, tidak adanya ruang laktasi, jaminan jam lembur, upah minimum regional yang

lebih rendah. Kesempatan berorganisasi, dan eksploitasi ekonomi melalui bank eceran. Berbagai persoalan ini menimbulkan cara pandang yang berbeda, di tingkat domestik belum selesainya pemahaman kesetaraan gender sehingga seringkali menimbulkan konflik rumah tangga sampai terjadinya gugat cerai yang semakin tinggi, di tingkat publik buruh industri masih dihadapkan pada eksploitasi dengan cara yang berbeda.

Mengingat persoalan tersebut diperlukan perspektif yang berbasis pada cara pandang dengan peningkatan kesadaran peran gender. Salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran bersama dengan melibatkan laki-laki suami buruh perempuan untuk memahami peran gendernya. Konsep laki-laki baru dengan melibatkan laki-laki dalam membangun relasi gender yang setara dan adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2006, Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan, kumpulan tulisan dalam Buku Sangkan Paran Gender, Cetakan ke III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bourdieu, Pierre, 2010, Dominasi Maskulin, Cetakan I, CV, Jalasutra, Bandung.
- Fatimaningsih, Endry, 2008, Analisis Situasi Dan Kondisi Perempuan Dalam Perspektif Gender di Kabupaten Lampung Tengah Prosiding Laporan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNILA, Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung;
- Handayani, Pipit Mugi & Sri Wahyuni, 2013, Peran wanita Pada Masyarakat Transisi, *Prosiding The 5 Internasional Conference Studies, Ethnicity and Globalization*
- Khotimah, 2009, Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan, *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang Vol 4 No 1 Januari-Juni 2009 pp.158-180*
- Lodico, Spaulding dan Voegtelle, 2006. *Methods in Educational research: From Theory to Practice*. USA: Jossey-Bass, A Willey Imprint. [www.joseybass.com](http://www.joseybass.com)
- Momsen, Janet 2010. *Gender and Development*, Routledge Publications, New York, Pp: 285, Index: Hard bound.
- Plaskow, Judith and Tamar Ross, 2007, *The View From Here: Gender Theory and Gendered Realities: An Exchange between Tamar Ross and Judith Plaskow*, *A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues*, No. 13, Jewish Women in the Economy (Spring 2007), pp. 207-251 Published by: Indiana University Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.2979/nas.2007.-.13.207> Accessed: 15-02-2016 22:45 UTC
- Pujiati, Amin, 2012, Kausalitas Antara Fundamental Ekonomi Daerah Dan Peran Wanita Dalam Pembangunan Kausalitas Antara Fundamental Ekonomi Daerah Dan Peran Wanita Dalam Pembangunan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, Juni 2012, Hlm.46-61*



- Puspita, Dyah Retna dkk, 2012-2014, Kebutuhan Penyuluhan/Konseling KB Dari perspektif Suami (Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga), Laporan Hasil Penelitian, LPPM Unsoed, Purwokerto.
- Puspitawati, Herien, 2010, Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik Dan Publik Pada Mahasiswa IPB YinYang ISSN: 1907-2791 Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010 pp.17-34, Pusat Studi Gender IAIN Purwokerto.
- Rosin, Hanna, 2012, The End Of Men And The Rise Of Women, Published By Penguin Group, New Yuork USA, ISBN 978-1-59448-804-7
- Slamet, 2013, Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) Studi Kasus Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar Personal Buruh Sektor Industri di Kabupaten Purbalingga, SKRIPSI FISIP UNSOED
- Windiani, 2011, Pemberdayaan Dan Perlindungan Pekerja Perempuan Borongan Di Rumah: Sebuah Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.2, Oktober 2011 ISSN: 2089-0192
- Harian Satelit Post, 2016, Banyak Pria Nganggur, Picu Perceraian, Papa Momong Papa Kerja, Jumat, 22 April than 2016